



Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini

e-ISSN: 2723-6390, hal. 653-662

Vol. 7, No. 1, Juli 2026

DOI: 10.37985/murhum.v7i1.1956

Strategi Pengelolaan Lembaga Pasca Alih Status TK Swasta menjadi TK Negeri

Nurjanna D. Bala¹, Fachrul Rozie², dan Fahma Mamlu'atul Mukarromah³

^{1,2,3} Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Mulawarman

ABSTRAK. Kebijakan alih status Taman Kanak-kanak (TK) swasta menjadi TK negeri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini. Namun, perubahan status kelembagaan tersebut tidak serta-merta diikuti oleh kesiapan manajerial dan sumber daya manusia di tingkat satuan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan lembaga pasca alih status TK swasta menjadi TK negeri di TK negeri 14 Kota Samarinda. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan partisipan kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan orang tua murid. Data di analisis secara interaktif menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alih status TK Tunas Harapan Loa Janan menjadi TK Negeri 14 Samarinda merupakan langkah strategis pemerintah yang berdampak positif pada tata kelola, mutu layanan PAUD, dan kepercayaan masyarakat. Meski menghadapi tantangan dalam sarana, status guru, dan adaptasi manajemen, pendampingan kepala sekolah dan pengawas membantu proses transisi berjalan bertahap dan mendapat respon positif dari orang tua.

Kata Kunci : Alih Status TK; TK Negeri; Pengelolaan Lembaga

ABSTRACT. The policy of changing the status of private kindergartens (TK) to public kindergartens is part of the government's strategy to strengthen governance and equalize early childhood education services. However, this change in institutional status is not immediately followed by managerial readiness and human resources at the educational unit level. The purpose of this study is to describe the institutional management strategy after the change in status of private kindergartens to public kindergartens in public kindergarten 14 in Samarinda City. The research method uses a qualitative approach with a case study type. Data collection techniques were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving participants: principals, teachers, school supervisors, and parents. Data were analyzed interactively using data reduction techniques, data presentation, and continuous conclusion drawing. The results show that the change in status of Tunas Harapan Loa Janan Kindergarten to Public Kindergarten 14 Samarinda is a strategic government step that has a positive impact on governance, the quality of PAUD services, and public trust. Despite facing challenges in facilities, teacher status, and management adaptation, the guidance of the principal and supervisor helped the transition process proceed gradually and received a positive response from parents.

Keyword: Transfer Status of Kindergarten; State Kindergarten; Institutional Management

Copyright (c) 2026 Nurjanna D. Bala dkk.

✉ Corresponding author : Nurjanna D. Bala

Email Address : nurjannadbala@gmail.com

Received 30 Desember 2025, Accepted 7 Februari 2026, Published 7 Februari 2026

PENDAHULUAN

Terwujudnya sistem pendidikan yang memiliki mutu yang baik dan berkelanjutan, pengelolaan lembaga merupakan salah satu disiplin ilmu yang peranan penting di dalamnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan lembaga merupakan ilmu yang mengelola sumber daya yang ada di dalam pendidikan, seperti tenaga pendidik, manajemen lembaga PAUD, kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, murid dan sebagainya. Pada proses interaksi yang ada di dalam pendidikan secara terencana dan tersistem guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan (1). Dari tahun ke tahun jumlah lembaga TK semakin bertambah seiring dengan kebutuhan anak usia dini yang harus dilayani. Peningkatan kuantitas lembaga TK ini diharapkan juga diiringi dengan peningkatan mutu layanan. Dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan TK, pemerintah berupaya untuk memfasilitasi, membina dan mengarahkan masyarakat agar memahami apa, mengapa, dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang benar (2).

Penguatan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan agenda strategis dalam pembangunan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah alih status TK swasta menjadi TK negeri guna meningkatkan akses, mutu, dan akuntabilitas layanan PAUD. Secara normatif, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola lembaga dan menjamin keberlanjutan layanan pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik (3). Penegerian satuan PAUD pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD, yang dianggap sebagai kebutuhan sangat penting. Dengan penegerian, satuan PAUD tersebut akan menjadi milik negara, secara bertahap dibiayai oleh negara, serta diatur dan dikelola oleh pemerintah. Penegerian satuan PAUD juga berarti menyerahkan aset satuan tersebut kepada negara untuk kemudian dikelola oleh pemerintah (4).

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pendirian dan pengembangan satuan pendidikan, pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD, mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik, melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD (5). Seiring berjalan waktu pemerintah kota Samarinda mengeluarkan surat keputusan wali kota Samarinda tahun 2025 tentang pendirian penyelenggaraan pendidikan TK Negeri 13 Samarinda, TK Negeri 14 Samarinda, dan TK Negeri 15 Samarinda. Dari surat tersebut terdapat 3 sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri dan salah satunya yaitu TK Tunas Harapan Loa Janan yang berdirinya pada tahun 1983 sekarang menjadi TK Negeri 14 Samarinda pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya yang mengatakan bahwa dalam proses penegerian terdapat beberapa syarat ketat yang menjadi pertimbangan, antara lain yaitu aset hak milik tanah yang jelas, dan hak milik tanah sekolah TK tersebut dahulunya memang milik pemerintah kota, serta luas tanah dan sarana prasarana fasilitas, kepala sekolah dan guru ASN, dan jumlah murid pun telah memenuhi kriteria (6). Namun di TK Negeri 14 Samarinda sudah dipertimbangkan oleh

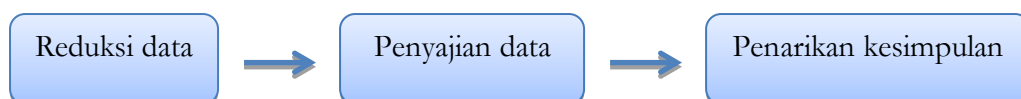
Pemerintah kota bahwa hak milik tanah sekolah tersebut punya pemerintah, kepala sekolah masih honor maka pemerintah menunjuk Plt Kepala sekolah ASN dari TK Negeri lain untuk menjalankan tugas dan bertanggungjawab secara sementara, guru-guru masih berstatus honor, tetapi jumlah muridnya memenuhi kriteria.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala sekolah lama berinisial SR, diketahui bahwa pemerintah mengambil alih karena status tanah milik pemerintah kota dan yayasan TK Tunas Harapan Loa Janan tidak memegang surat tanah maka di ambil alihlah oleh pemerintah. Karena kepala sekolah dan guru masih status honor maka kepala sekolah ditunjuk oleh pemerintah berasal dari sekolah lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pengelolaan lembaga pasca alih status TK Swasta menjadi tk negeri di TK Negeri 14 samarinda tahun 2025, termasuk penguatan kepemimpinan transformasional kepala sekolah, penyesuaian sistem tata kelola dan administrasi, tantangan yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap pasca alih status TK Negeri 14 Samarinda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengelolaan lembaga pasca alih status TK Swasta menjadi TK Negeri di TK Negeri 14 Samarinda. Teknik pengumpulan data meliputi pertama, wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 1 pengawas, 2 kepala sekolah lama dan baru, 2 guru, dan 1 orangtua. Kedua, observasi partisipatif untuk mengumpulkan data mengenai lembaga alih status TK Swasta menjadi TK Negeri 14 Samarinda. Ketiga, dokumentasi sebagai metode penunjang untuk memperoleh data/fakta dilapangan.

Teknik pemilihan partisipan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang sudah mendapatkan izin dari pihak Lembaga tersebut. Pemilihan ini didasarkan pada tujuan tertentu atau karakteristik tertentu yang diinginkan oleh peneliti untuk memahami lebih dalam fenomena yang diteliti (6). *Purposive sampling* dilakukan berdasarkan kriteria pengawas, kepala sekolah, guru, orangtua yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan lembaga pasca alih status TK Negeri 14 Samarinda. Penelitian dilaksanakan di TK Negeri 14 Samarinda, Kalimantan Timur pada bulan Desember 2025. Adapun data yang telah diperoleh, akan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berkelanjutan sesuai model Miles dan Huberman (7).



Gambar 1. Tahapan Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, Kepemimpinan Transformasional dalam Masa Transisi. TK Tunas Harapan Loa Janan merupakan salah satu sekolah jenjang TK berstatus swasta berdiri pada tanggal 8 Desember 2009 yang berada di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala sekolah dan guru-guru TK Tunas Harapan Loa Janan masih berstatus honor belum ada yang ASN. Yayasan TK Tunas Harapan Loa Janan ini tidak memiliki surat tanah secara resmi dan tanah tersebut masih berstatus milik pemerintah Kota Samarinda sehingga di ambil alih oleh Pemerintah pada tanggal 13 Maret 2025 diresmikan menjadi TK Negeri 14 Samarinda dan Kepala sekolah ditunjuk dari sekolah lain yang berstatus ASN untuk menjadi Plt kepala sekolah di TK Negeri 14 Samarinda.

Hal ini didukung oleh pendapat Anggraini, Perubahan status sekolah swasta menjadi negeri memiliki alasan yang beragam. Sekolah akan menghadapi tantangan-tantangan dalam perubahan, tanpa perubahan sekolah tidak akan bertahan lama. Perubahan status sekolah swasta menjadi negeri akan mengalami perubahan visi misinya agar dapat memberi sumbangan di dalam proses pendidikan (8). Hal ini diperkuat pendapat dari pengawas berinisial RD yang mengatakan bahwa kebijakan alih status ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat layanan PAUD. Dengan menjadi TK negeri, sekolah memiliki legitimasi yang lebih kuat, terutama dalam hal pembiayaan dan pengawasan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menuntut kesiapan manajemen sekolah karena sistem kerja yang sebelumnya relatif fleksibel harus menyesuaikan dengan aturan birokrasi pemerintah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu yaitu keberhasilan proses pendidikan anak pada masa dini tersebut menjadi dasar atau pondasi untuk proses pendidikan selanjutnya. Pada masa ini, stimulasi pendidikan yang positif sangat penting bagi perkembangan anak, karena stimulasi yang tidak tepat akan berdampak negatif di kehidupan selanjutnya dan tidak dapat diperbaiki, salah satu upayanya yaitu dengan penegerian lembaga (9). Peran pengawas cukup intensif, terutama pada masa awal alih status (10). Pengawas pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan atau bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah (11). Di TK Negeri 14 Samarinda, pengawas melakukan pendampingan terkait pemenuhan standar administrasi, supervisi akademik, serta pembinaan kepala sekolah dan guru. Pendampingan ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga edukatif agar sekolah tidak merasa terbebani dengan perubahan yang terjadi.

Kepala sekolah baru berinisial AP di TK Negeri 14 Samarinda memberi keteladanan dalam pelaksanaan tugas ia bertanggungjawab mengelola sekolah mulai dari struktur pada saat TK Swasta dibawah naungan yayasan kini dibawah naungan Dinas Pendidikan, melakukan observasi dan pendekatan apa yang dibutuhkan sekolah, menjalin hubungan yang baik dan memberikan semangat terhadap guru, orangtua, dan murid. AP memandang konflik adalah sebagai hal yang wajar dan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dengan mencari solusi yang baik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Latifah, dkk yaitu Kepala TK Negeri selama kepemimpinannya terdapat empat macam pendekatan studi kepemimpinan, yaitu: pendekatan pengaruh kewibawaan, pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan situasional. Fungsi dari kepemimpinannya secara garis besar yaitu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam suatu organisasi agar mau melakukan apa yang dikehendaki sebagai seorang pemimpin. Serta memiliki kemampuan dasar berupa *technical skills*, *human skill*, dan *conceptual skill*, pengetahuan dan keterampilan profesional (12). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawas dan kepala sekolah berperan sebagai aktor kunci dalam mengelola perubahan pasca alih status. Kepemimpinan transformasional diwujudkan melalui penegasan visi, penguatan koordinasi internal, dan pengelolaan resistensi guru terhadap perubahan sistem kerja.

Kedua, Penataan Tata Kelola dan Sistem Administrasi. Penataan tata kelola dan administrasi Pendidikan menyangkut semua kegiatan, baik mengenai materi, personel, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya, yang harus diatur sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi-kondisi belajar mengajar yang baik (13). Hal ini sejalan dengan pendapat kepala sekolah lama berinisial SR yaitu terkait kebijakan dan kelola sistem administrasi dahulu hanya pertimbangan dari yayasan karena sudah menjadi TK Negeri maka butuh pertimbangan dan mengikuti kebijakan dari dinas pendidikan. Hal ini diperkuat dengan pendapat pengawas berinisial RD mengatakan bahwa Sekolah dituntut untuk memiliki perencanaan yang lebih sistematis, seperti penyusunan RKAS, laporan keuangan, dan administrasi kepegawaian. Selain itu, kepala sekolah juga harus lebih aktif dalam koordinasi dengan dinas pendidikan dan pengawas sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini adalah bagian dari manajemen untuk merencanakan, mengadakan, merawat dan bertanggung jawab, menginventarisasi, menghapus peralatan ataupun barang yang sudah tidak bisa digunakan, hal ini sangatlah penting untuk menunjang pembelajaran. Sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini merupakan salah satu faktor pendukung dalam menunjang mutu dan proses kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, adanya sarana dan prasarana akan memberikan kenyamanan terhadap seluruh pelaku pendidikan pada suatu lembaga ataupun sekolah (14). Permainan *Outdoor* merupakan permainan diluar yang sangat menarik bagi anak yang dimana terdapat jenis-jenis permainan : Jungkat-jungkit, Perosotan, Ayunan, dan sebagainya. Yang bisa membuat anak mengeksplorasi dirinya dalam bermain diluar dan juga anak mampu mengembangkan kemampuan motrik anak , tetapi juga sangat berbahaya bagi anak jika kondisi fisik pada permainan kurang aman untuk anak sehingga bisa menyebabkan cedera bagi anak selanjutnya (15).

Hal ini dinyatakan oleh kepala sekolah baru berinisial AP mengatakan bahwa karena terkendala lahan kurang luas maka masih menggunakan permainan *outdoor* yang sudah dari sebelum menjadi TK Negeri, ia sudah mengajukan proses kebutuhan sarana dan prasarana sudah beberapa persen pemeliharannya di permainan *outdoor*, menambah permainan untuk didalam kelas saja dan pengajuan lainnya di tahun 2026.

Informasi dari pemerintah bahwa ingin dibangun satu gedung kelas tetapi masih terkendala karena lahan nya sempit jadi masih dipertimbangkan.

Sekolah swasta umumnya dibiayai oleh yayasan pengelola, yang mencakup operasional seperti listrik air, dan sarana-prasarana bersumber dari SPP murid dan dana BOSP. Yayasan bertanggung jawab penuh, terutama jika dana BOS tidak mencukupi, karena sekolah swasta dikelola mandiri. Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari operasional yang wajib dilaporkan dalam perpajakan yayasan (16). Sedangkan di TK Negeri 14 Samarinda, guru berinisial AS mengatakan bahwa pada saat sekolah TK menjadi negeri mendapat fasilitas dari pemerintah berupa pembiayaan listrik dan air. Pemerintah memberikan fasilitas TV *Smartboard* sudah berdampak baik pada guru dan murid bermain sambil belajar mengenal teknologi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alih status mendorong sekolah untuk menyesuaikan tata kelola dan sistem administrasi sesuai regulasi sekolah negeri. Penelitian menemukan bahwa penataan administrasi menjadi strategi utama dalam membangun akuntabilitas lembaga. Namun, peningkatan beban administratif juga menuntut adanya dukungan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi guru.



Gambar 2. Tampak Depan TK Negeri 14 Samarinda

Ketiga, Pembinaan Guru dan Adaptasi Budaya Kerja. Syarat beroperasi nya TK Negeri harus memiliki pegawai terutama Kepala sekolah, guru yang sudah berstatus ASN dan terjadinya perombakan struktur (17). Namun pada saat mau beralih dari TK Swasta ke TK Negeri 14 Samarinda guru semua berstatus honor punya ketakutan di geser ke sekolah lain sehingga kepala sekolah baru berinisial AP memberikan pemahaman sesuai yang disampaikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Samarinda bahwa kepala sekolah lama menjadi guru dan guru yang ada didalam TK tersebut tidak berpindah. Mudahan apa yang di janjikan oleh pemerintah itu terlaksana, terkait kelola lembaga, sarana prasarana, dan penjaminan mutu pendidikan terhadap guru honor dan murid.

Pada saat beralih menjadi TK Negeri 14 Samarinda guru merasakan adaptasi yang pertama dari lingkungan sekitar bahwa masyarakat antusias ingin menyekolahkan anaknya di TK Negeri 14 karena di kecamatan Loa Janan belum ada sekolah TK Negeri dan TK Negeri 14 inilah yang pertama kali. Kedua, jam kerja pendidik dan tenaga pendidikan berubah pada saat di yayasan pulang kerja bisa jam 13.00 Wita setelah menjadi TK Negeri pulang kerja jam 15.20 Wita. Hal tersebut diperkuat dari pendapat pengawas berinisial RD yang mengatakan bahwa respon guru terhadap perubahan status di TK negeri 14 tersebut responnya beragam. Kepala sekolah umumnya

menyadari tanggung jawab yang lebih besar dan berupaya menyesuaikan diri. Namun secara bertahap mulai memahami sistem baru, terutama setelah adanya pendampingan dan sosialisasi dari dinas pendidikan dan pengawas. TK Negeri prioritas perhatian dari Pemerintah salah satunya dalam kesejahteraan guru.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Oktafiana, kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi semua guru, pentingnya kesejahteraan guru adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja untuk mempertahankan guru yang memiliki kemampuan dan bakat yang baik dalam proses belajar. Program kesejahteraan guru yang disusun berdasarkan peraturan legal, berdasarkan keadilan dan kelayakan serta berpedoman pada peraturan pemerintah (18). Untuk pembinaan guru aktif melakukan pengembangan kompetensi kepribadian melalui berbagai upaya, seperti pelatihan, seminar, dan penguatan keterampilan komunikasi (19). Pengawas merekomendasikan adanya program pendampingan khusus bagi TK alih status, terutama pada satu hingga dua tahun pertama. Pendampingan ini sebaiknya tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga pada penguatan kompetensi pedagogik guru agar kualitas layanan PAUD tetap terjaga.

Namun pendapat dari guru inisial AS mengatakan bahwa saat ini pelatihan atau bimbingan di berikan kepada guru setelah alih status pelatihan guru khusus setelah negeri belum ada, tetapi kalau untuk pelatihan perbaikan diri istilahnya menambah wawasan guru ada tetapi secara umum jadi bergabung dengan sekolah swasta. Hal ini ditambahkan oleh pendapat kepala sekolah baru berinisial AP mengatakan bahwa ada pelatihan semua guru TK di Samarinda kami berantusias ikut terlibat dan dapat uang transportasi agar semangat untuk datang ke pelatihan dan menambah wawasan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fitri yaitu menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan pendidik TK berupa pembinaan guru dan yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan kesadaran guru. Adapun kegiatannya berupa: Pembekalan guru, Kegiatan magang atau observasi, pembinaan umum, keterlibatan guru secara aktif dalam penerapan sistem manajemen mutu, dan kegiatan pelatihan bagi guru. Pemberian *Reward* untuk memotivasi dan memberikan efek jera perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu bila diperlukan (20). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru menghadapi tantangan adaptasi terhadap budaya kerja birokratis yang berbeda dengan sistem swasta. Strategi pembinaan dilakukan melalui supervisi pengawas dan pendampingan internal. Namun, pembinaan yang bersifat administratif masih perlu diimbangi dengan penguatan profesionalisme pedagogik agar tidak mengganggu kualitas layanan PAUD.

Keempat, Persepsi Orang Tua terhadap Perubahan Layanan. Persepsi merupakan proses bagaimana individu dapat mengenali diri dan sekitarnya, melalui stimulus yang diterimanya, dan individu akan mengalami persepsi, suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya kemudian stimulus diteruskan ke pusat susunan saraf yaitu otak, dan otak merupakan proses psikologisnya sehingga individu bisa mempersepsi stimulus yang diterimanya (20).

Persepsi orang tua yang sangat positif, dukungan guru, serta sinergi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi faktor utama keberhasilan perkembangan holistik anak (21). Hal ini sejalan dengan pendapat dari orangtua berinisial EL mengatakan “saya ada perasaan senang karena anak saya bisa masuk negeri kalau bicara perubahan belum terlalu banyak yang berubah karna baru peralihan. Semoga sekolah ini di perhatikan oleh pemerintah karena ini sudah bagian dari pemerintah untuk membangun bangunan yang lebih layak dari sekarang”.

Agar persepsi orang tua murid terhadap TK baik, maka kepala sekolah dan para guru diharapkan melakukan kerjasama dan komunikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan jasa pendidikan yang baik sesuai yang diharapkan (22). Berdasarkan yang dialami orangtua inisial EL yaitu terkait pelayanan kepala sekolah dan guru sudah meningkat jika kami ada hal yang kurang berkenan kami komunikasikan dengan kepala sekolah dan guru lalu mencari solusi bersama.

Salah satu program pemerintah yaitu MBG (makanan bergizi gratis) MBG memiliki potensi untuk menjadi kebijakan jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kesehatan anak sekolah, tetapi juga memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas (23). Di TK Negeri 14 Samarinda sampai saat ini masih dalam tahap pengajuan SK ke Dinas terkait makanan bergizi gratis tetapi di TK Negeri 14 Samarinda ini ada kegiatan penunjang gizi anak yaitu pihak sekolah mengadakan makan sehat kolaborasi dari orangtua dan guru memperkenalkan anak-anak makanan sehat sejak dini seperti makan sayuran dan buah setiap bulan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki persepsi yang positif, didukung oleh komunikasi dan kerja sama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan orang tua, berperan penting dalam menunjang perkembangan holistik anak. Meskipun program MBG di TK Negeri 14 Samarinda masih dalam tahap pengajuan, upaya sekolah melalui kegiatan makan sehat hasil kolaborasi guru dan orang tua menunjukkan komitmen dalam mendukung pemenuhan gizi dan kualitas pendidikan anak sejak dini.

KESIMPULAN

Alih status TK Tunas Harapan Loa Janan menjadi TK Negeri 14 Samarinda merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat layanan PAUD, terutama dari aspek legitimasi kelembagaan, pembiayaan, pengawasan, dan penjaminan mutu pendidikan guru dan anak usia dini. Perubahan status ini membawa dampak signifikan terhadap tata kelola sekolah, meliputi penyesuaian visi dan misi, sistem administrasi yang lebih terstruktur, serta penerapan aturan birokrasi pemerintahan yang menuntut kesiapan manajemen sekolah. Peran kepala sekolah dan pengawas sangat penting dalam masa transisi, khususnya dalam pendampingan administrasi, supervisi akademik, pembinaan guru, serta menjaga iklim kerja yang kondusif dan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana, status guru honor, dan adaptasi jam kerja, proses pendampingan yang bersifat edukatif membantu sekolah beradaptasi secara bertahap. Alih status ini juga mendapat respon positif dari

masyarakat dan orang tua, ditandai dengan meningkatnya minat menyekolahkan anak di TK Negeri 14 Samarinda.

PENGHARGAAN

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Fachrul Rozie dan Ibu Fahma Mamlu'atul Mukarromah atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang sangat berharga selama proses penelitian. Kontribusi dan masukan dari kedua beliau telah berperan penting dalam penyempurnaan penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada pengawas, kepala sekolah, guru, dan orangtua yang telah berkenan memberikan izin dan kepercayaan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

REFERENSI

- [1] E. Munastiwi, *Manajemen Lembaga PAUD Untuk Pengelola Pemula*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2019. [Daring]. Tersedia pada: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36581/>
- [2] A. P. Dwinugraha, "Strategi pengembangan lembaga pendidikan taman kanak-kanak," *Publisia J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 6, no. 1, hal. 63–72, Apr 2021, doi: 10.26905/pjiap.v6i1.5632.
- [3] Y. Murdianigrum, U. Rahmadi, A. Martini, dan R. Waspodo, *Pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD: dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal PAUD*. 2019. [Daring]. Tersedia pada: <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/18036/>
- [4] B. B. Affandri, "Formulasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Regulasi Permendikbud 32 Tahun 2018 Di Kabupaten Lamongan," *Otonomi*, vol. 22, no. 2, hal. 410, Nov 2022, doi: 10.32503/otonomi.v22i2.3020.
- [5] S. Amanah, D. Riyanto, dan D. Rizqullah, "Pentingnya Pelayanan Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," *Indones. J. Educ. Couns.*, vol. 7, no. 1, hal. 131–138, Jan 2023, doi: 10.30653/001.202371.242.
- [6] M. P. Aditya, "Analisis Transformasi Lembaga Pendidikan Swasta menjadi Lembaga Pendidikan Negeri Studi Kasus pada TK Negeri 7 Kota Yogyakarta," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66610/>
- [7] U. Lasiyono dan W. Y. Alam, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?id=_9b-EAAAQBAJ
- [8] A. D. Anggraini, A. Aswandi, dan M. Syukri, "Perubahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Sekadau," *J. Pendidik. dan Pembelajaran Khatulistiwa*, vol. 10, no. 6, 2018, doi: 10.26418/jppk.v10i6.47701.
- [9] A. W. Ibnu Salman, "Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Raudhatul Athfal dalam Telaah Renstra Kemenag 2015-2019," *Model. J. Progr. Stud. PGMI*, vol. 7, no. 2, hal. 167–184, 2020, doi: 10.69896/modeling.v7i2.664.
- [10] R. M. Nurfatin, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah oleh Kepala Sekolah Ditinjau dari Manajemen Kurikulum dan Manajemen Keuangan [Implementation of School Based Management by Principal in Terms of Curriculum Management

- and Financial Management],” *J. Ketopong Pendidik.*, vol. 1, no. 1, hal. 22, Jun 2021, doi: 10.19166/jkp.v1i1.3819.
- [11] P. Setyawati, E. Erawan, dan D. Zulfiani, “Peran Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 002 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara,” *eJournal Adm. Negara*, vol. 8, no. 3, hal. 9208–9220, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3116>
- [12] R. Latifah, K. Damrah, dan P. Esen, “Kepemimpinan Kepala Taman Kanak-Kanak dalam Meningkatkan Kinerja Guru di TK Daarut Tholibiin Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu,” *Unisan J.*, vol. 2, no. 1, hal. 167–180, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/469>
- [13] E. S. B. Herawati dan A. Adiman, *Tata Kelola Administrasi Persekolahan*. 2020. [Daring]. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/351094575_Tata_Kelola_Administrasi_Persekolahan
- [14] Q. Sandi dan H. Fauzi, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Taman Kanak-Kanak,” *J. DZURRIYAT J. Pendidik. Islam Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 1, hal. 94–100, Mar 2023, doi: 10.61104/jd.v1i1.28.
- [15] A. S. Hani, A. S. Sari, A. N. Ismiatun, M. K. Nada, dan S. A. Aszari, “Studi Analisis Permasalahan Permainan Outdoor Di Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina Muara Bulian,” *J. Teknol. Pendidik. Dan Pembelajaran*, vol. 01, no. 03, hal. 472–476, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/85>
- [16] S. Yudawati, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Jaya Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung,” Universitas Islam Riau, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://repository.uir.ac.id/10797/>
- [17] R. Oktafiana, F. Fathiyani, dan M. Musdalifah, “Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan,” *J. MAPPESONA*, vol. 3, no. 3, 2020, doi: 10.30863/mappesona.v3i3.1801.
- [18] Mutmainnah, W. I. Kartika, dan F. Rozie, “Analisis Kompetensi Kepribadian Guru PAUD di TK Negeri 03 Tenggara,” *Early Child. J.*, vol. 5, no. 2, hal. 92–99, Apr 2025, doi: 10.30872/ecj.v5i2.4763.
- [19] F. Handayani dan N. Nurfuadi, “Manajemen Sumber Daya Pendidik Taman Kanak-Kanak Istiqomah Sambas Kabupaten Purbalingga,” *J. Kegur. dan Ilmu Pendidik.*, vol. 1, no. 2, hal. 95–107, Agu 2023, doi: 10.61116/jkip.v1i2.134.
- [20] S. Sherly, “Pengaruh Persepsi dan Loyalitas Orang Tua Murid terhadap Keputusan Pemilihan Jasa Pendidikan di TK Swasta Sultan Agung Pematangsiantar dengan Citra TK Swasta Sultan Agung Pematangsiantar sebagai Variabel Mediasi,” *SULTANIST J. Manaj. dan Keuang.*, vol. 4, no. 1, hal. 29–36, Jan 2016, doi: 10.37403/sultanist.v4i1.62.
- [21] F. Zahratul, “Analisis Persepsi Orang Tua pada Pendidikan Anak Usia Dini di TK Negeri 01 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat,” UIN Raden Intan Lampung, 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://repository.radenintan.ac.id/42461/>
- [22] R. Qomarrullah, S. Suratni, L. Wulandari S, dan M. Sawir, “Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan,” *Indones. J. Intellect. Publ.*, vol. 5, no. 2, hal. 130–137, Mar 2025, doi: 10.51577/ijipublication.v5i2.660.